

**EFEKTIVITAS PROGRAM RESTRUKTURISASI DALAM MENGATASI
PEMBIAYAAN BERMASALAH ATAS DAMPAK PANDEMI *COVID-19*
DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

FAUZI HASYIM

NPM 1826061005



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM RESTRUKTURISASI DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH ATAS DAMPAK PANDEMI *COVID-19* DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR LAMPUNG

Oleh

Fauzi Hasyim

The Organisation for Economic Co-Operation and development (OECD) menyebutkan bahwa pandemi *covid-19* berimplikasi terhadap berbagai aspek. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan. Kemudian aspek UMKM yang menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit perbankan. Menanggapi hal tersebut OJK telah merilis aturan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Kebijakan Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19*. Dengan dikeluarkan kebijakan ini, maka debitur yang terkena dampak *covid-19* dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank dan perusahaan pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, efektivitas program restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah menjadi menarik untuk diteliti.

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti melihat tingkat kepatuhan pembayaran angsuran pembiayaan pasca dilakukan restrukturisasi pembiayaan menjadi meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program restrukturisasi efektif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di perbankan. Saran peneliti yaitu perlu adanya sosialisasi terkait peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 11/PJOK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *covid-19*.

Kata Kunci : Efektivitas, Restrukturisasi, Dampak *COVID-19*, BSI

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE RESTRUCTURING PROGRAM IN OVERCOMING PROBLEM FINANCING OF THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC IN BANK SYARIAH INDONESIA BANDAR LAMPUNG BRANCH

By

Fauzi Hasyim

The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) stated that the COVID-19 pandemic had implications for various aspects. Indonesia, which is dominated by the existence of UMKM as the backbone of the national economy, is also seriously affected not only in terms of total production and trade value but also the number of workers who have lost their jobs. Then the UMKM aspect that causes a decline in performance from the demand side which ultimately has an impact on the supply side, namely termination of employment and the threat of non-performing bank credit payments. In response to this, OJK has released regulation Number 11/PJOK.03/2020 concerning National Economic Stimulus Policies as Countercyclical Policies for the Impact of the Spread of Covid-19. With the issuance of this policy, debtors affected by COVID-19 can apply for credit restructuring to banks and finance companies. Based on this, the effectiveness of the restructuring program in overcoming non-performing financing becomes interesting to study.

This type of research is descriptive with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation and documentation. The results showed that the researchers saw that the level of compliance with financing installment payments after the restructuring of financing had increased. so it can be concluded that the restructuring program is effective in overcoming problematic financing in banks. Researchers suggest that there is a need for socialization related to OJK regulations Number 17/POJK.03/2021 concerning the second amendment to POJK Number 11/PJOK.03/2020 concerning the national economic stimulus as a countercyclical policy as a result of the spread of COVID-19.

Keywords: Effectiveness, Restructuring, Impact of COVID-19, BSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM RESTRUKTURISASI DALAM MENGATASI
PEMBIAYAAN BERMASALAH ATAS DAMPAK PANDEMI COVID-19
DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR LAMPUNG**

Oleh

FAUZI HASYIM

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PROGRAM RESTRUKTURISASI
DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
ATAS DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI BANK
SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Fauzi Hasyim**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1826061005**

Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



Pembimbing I

Dr. Bambang Utoyo, M.Si
NIP. 19630206 199803 1 002

Pembimbing II

Dr. K. Bagus Wardianto, M.A.B.
NIP. 19770301 200812 1 001

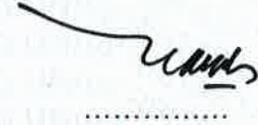
**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

Dr. Suropto, S.Sos., M.A.B
NIP. 19690226 199903 1 001

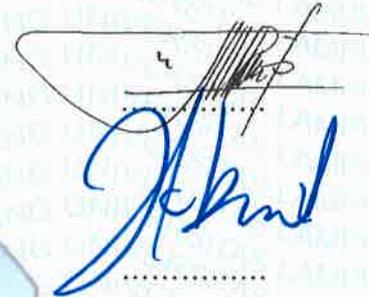
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Bambang Utoyo, M.Si**



Penguji Utama : **Dr. Supto, S.Sos., M.A.B**



Sekretaris : **Dr. K. Bagus Wardianto, M.AB.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T
NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Seminar Hasil Tesis: **20 Juni 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, tesis/laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister), baik di universitas lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan oleh tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 20 Juni 2022

Fauzi Hasyim
1826061005



RIWAYAT HIDUP



Penulis merupakan putra bungsu dari pasangan Hasyim Anang dan Zaini yang dilahirkan pada tanggal 18 September 1993 di Kotabumi, Lampung Utara. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN 2 Kotabumi pada tahun 2000 sampai dengan 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan SMP N 3 Kotabumi pada tahun 2006 sampai dengan 2009. Selanjutnya, pada tahun 2009 penulis kembali melanjutkan jenjang pendidikan di SMA N 4 Kotabumi, dan lulus ditahun 2011.

Setelah itu, penulis meninggalkan tanah kelahiran untuk menempuh pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2015. Semasa kuliah, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga sekarang.

Sebelum terdaftar di program pascasarjana Universitas Lampung, penulis telah bekerja di Bank Mandiri Syariah Cabang Bandar Lampung, yang kini telah merger dan berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia. Semangat penulis untuk terus memperbaiki jenjang pendidikannya, telah memotivasi penulis untuk kemudian melanjutkan pendidikan S2 Di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung pada tahun 2018. Aktivitas kerja yang padat dan hiruk pikuk kehidupan rumah tangga membuat proses perkuliahan di jenjang ini menjadi sedikit terlambat dalam penyelesaian masa *study*. Pada setengah perjalanan pendidikan ini memang penulis telah memutuskan untuk menikah. Namun hal ini tidak mengakhiri semangat penulis untuk menyelesaikan program studinya. Akhirnya, meskipun dengan sedikit terbata-bata, penulis berhasil menyelesaikan study-nya di pertengahan tahun 2022 ini.

MOTTO

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.”

(Nelson Mandela)

“Keberhasilan bukanlah hasil, melainkan usaha yang dilakukan secara terus menerus dan diiringi doa”

(Fauzi Hasyim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan Puji Dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT
kupersembahkan tesis ini kepada:

Orang Tua, Istri, dan anakku Yang Tiada Henti Selalu Memberikan Doa,
Dukungan Motivasi, dan Semangat Untuk Kesuksesanku

Keluarga Besar dan Sahabat-Sahabat Tercinta

Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang Sangat Berjasa

Dan

Almamater Tercinta

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis yang berjudul “Efektivitas Program Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Atas Dampak Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung” ini.

Penyusunan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan dan penyusunan tesis ini mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Drs. Simon Sembiring, Ph.D., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP., CPOf., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Bidang Umum Universitas Lampung
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama
6. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang juga selaku pembimbing akademik.
7. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

8. Bapak Dr. Suripto, S.Sos., M.A.B, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Siselaku dosen pembimbing utama. Terimakasih atas bimbingan, arahan, nasihat, saran, motivasi, dukungan dan pembelajaran selama masa penyusunan tesis ini.
10. Bapak Dr. K. Bagus Wardianto, S.Sos., M.AB, selaku dosen pembimbing kedua. Terimakasih atas bimbingan, arahan, nasihat, saran, motivasi, dukungan dan pembelajaran selama masa penyusunan tesis ini.
11. Seluruh dosen dan staff Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih atas pembelajaran dan ilmu yang telah diberikan Selama ini kepada penulis.
12. Kedua Orang Tuaku, terimakasih atas bimbingan dan motivasi dalam menghadapi perjalanan hidup ini dari sejak Senja lahir sampai dengan sekarang. Terimakasih atas segala doa dan keringat yang telah terkuras hingga saya bisa berada di titik ini.
13. Istriku tercinta, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H yang senantiasa mensupport segala perjalanan baik ini. Terimakasih untuk terus berjalan seiring dan seirama menuju cita- cita ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu selama kuliah maupun dalam meyelesaikan tesis ini.

Bandar Lampung, 20 Juni 2022

Penulis

Fauzi Hasyim

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Umum Ilmu Administrasi Negara	6
2.2 Pembiayaan Bermasalah	14
2.3 Kebijakan Pembiayaan	17
2.4 Konsep Efektivitas	19
2.4.1 Ukuran Efektivitas	19
2.4.2 Faktor – Faktor Pengaruh Efektivitas	22
2.5 Prinsip Dasar Restrukturisasi Program dan Kegiatan	27
2.6 Dasar Hukum Restrukturisasi Program dan Kegiatan	29
2.6.1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/9/PBI/2011 tentang tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	29
2.6.2 Peraturan OJK Nomor 17/PJOK.03/2021 Tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 11/Pjok.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019	30
2.6.3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR	31

2.6.4 Petunjuk Teknis Operasional Skema Restrukturisasi Nasabah Pembiayaan Segmen Retail Terdampak Covid-19 PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	33
2.7 Penelitian Terdahulu	33
2.8 Kerangka Pikir	37
III. METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Sifat Penelitian	42
3.4 Pendekatan Penelitian	42
3.5 Sumber Data.....	43
3.6 MetodePengumpulanData	44
3.7 MetodePengolahanData	47
3.8 Alat Bantu Pengumpulan Data.....	47
3.9 Validasi Data.....	48
3.10 Teknik AnalisisData.....	48
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Profil Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung	52
4.2.1 Restrukturisasi Program Dan Kegiatan Di Bank Syariah Indonesa Cabang Bandar Lampung.....	56
4.2 Pembahasan.....	68
4.2.1 Kesiapan Pemerintah Dalam Mempersiapkan Regulasi Penerapan Program Restrukturisasi Di Perbankan	68
4.2.2 Efektivitas Program Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Atas Dampak Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung.....	75

V. KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam administrasi negara, negara dianggap sebagai suatu organisasi modern.¹ Organisasi modern adalah organisasi yang memiliki anggaran dasar atau konstitusi, maksud dan tujuan yang jelas, struktur dan mekanisme yang dikembangkan secara sistematis dan berencana rasional, agar mampu melakukan “produksi” segala sesuatu yang dikehendaki atau dibutuhkan menurut perhitungan pimpinannya dan atau para anggotanya.² Dalam hal ini, lembaga publik merupakan unit dari organisasi, dan administrator merupakan bagian dari unit tersebut.³

Namun, pengertian administrasi seringkali disamakan dengan kebijakan. Sebenarnya, bila kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian arus kegiatan yang secara sadar dikembangkan dan diterapkan sehubungan dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan, jelaslah bahwa kebijakan tidak hanya dibatasi pada tingkatan puncak organisasi. Misalnya, walaupun kebijakan tertentu dapat dikembangkan pada tingkat pengarahan organisasi dan diterapkan pada organisasi secara keseluruhan (dalam batas-batas yang ditentukan oleh kebijakan itu serta dalam organisasi yang disentralisasi secara administratif), akan terdapat kebutuhan pengembangan organisasi di tingkat lapangan, sehingga memenuhi persyaratan lapangan. Ringkasnya, administrasi menunjukkan proses yang menyeluruh yang meliputi, baik manajemen maupun unsur pembuatan kebijakan.⁴

Upayapembangunanadministrasinegarapadahakekatnyamerupakan

¹Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Cv Pustaka Setia. H. 185

²*Ibid.*,

³*Ibid.*, H. 12

⁴*Ibid.*,

penyempurnaan sistem dan proses dalam penyelenggaraan kebijakan Negara. Tentunya tujuan implementasi kebijakan Negara tidak terlepas dari kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Oleh karenanya administrasi Negara senantiasa muncul dalam semua realitas sosial , termasuk dalam ruang lingkup ekonomi di dunia perbankan.

Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan, mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang banyak. Bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat. Suatu kredit/pembiayaan dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit/ pembiayaan tersebut.⁵

Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Selain itu, pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit di Perbankan.⁶

⁵Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Point*, Vol. 2, No. 1, *Url: Ejournals.Umma.Ac.Id/Index.Php/Point/Article/View/576/408*, 1-10.

⁶Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jihi Parahyangan Centre For International Studies*, Volume, *Url: Http://103.36.68.33/Index.Php/Jurnalilmiahhubunganinternasiona/Article/View/3870*, 1-6.

Sejak awal Tahun 2020, Indonesia bahkan didunia dihebohkan dengan muncul virus jenis baru yang disebut sebagai Virus Corona atau dalam sebutan ilmiahnya disebut sebagai Covid-19. Virus corona mulai merebak disekitar wilayah Wuhan dan kini telah menjangkit lebih dari 100 negara. Sebanyak lebih dari 100.000 orang didunia dinyatakan positif terinfeksi virus ganas ini. Semakin meluas nyawa bahcoronake berbagai belahan dunia menjadi ancaman serius bagi perekonomian global. "Penyebaran COVID-19 yang semakin meluas akan memperlama periode jatuhnya perekonomian Asia Pasifik. Australia, HongKong, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Thailand diprediksi terancam terseret ke dalam jurang resesi, menurut S&P. Virus Corona muncul dan memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sekto rekonomi. (Abdi, 2020)⁷ Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah Maret 2020 dari sisi penghimpunan Dana Bank Umum Syariah secara nasional menurun dari 236.447 Miliar di bulan Februari menjadi 234.240 Miliar di Maret 2020.

Menanggapi kondisi global tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid 2019. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, maka debitur yang terkena dampak Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank dan perusahaan pembiayaan. Restrukturisasi bertujuan untuk meringankan kreditur dalam bentuk penyesuaian cicilan pokok, penurunan suku bunga serta perpanjangan waktu.⁸

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu implementasi kebijakan Negara melalui Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan untuk mencapai tujuan Negara, yakni kesejahteraan rakyat dan keadilan social. Restrukturisasi pembiayaan adalah bantuan pelunasan pinjaman. Restrukturisasi bukanlah penghapusan, tetapi memberikan kelonggaran untuk melunasi pembayaran utang.

⁷Abdi, M. N. (2020, Maret). Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). *Akmen, Volume 17 Nomor 1*, Url: <https://E-Jurnal.Stienobel-Indonesia.Ac.Id/Index.Php/Akmen/Article/View/866/823>, 90-98.

⁸Yusuf, M. F. (2020, April 22). *Smartlegal.Id*. Retrieved Juni 20, 2020, From *Smartlegal.Id*: <https://Smartlegal.Id/Galeri-Hukum/Pandemi-Covid-19/2020/04/22/Mekanisme-Restrukturisasi-Kredit-Bagi-Debitur-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19/>

Pinjaman masih harus dibayar tetapi diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan dengan Bank. Relaksasi dari pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UKM dan UKM, dengan masa berlaku hingga satu tahun dari 13 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021. Pelaksanaannya tergantung pada kebijaksanaan masing-masing bank.⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Efektivitas Program Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah menjadi menarik untuk diteliti mengingat perbankan merupakan urat nadi perekonomian bangsa yang tentunya saling berkaitan dengan bidang-bidang lain dalam membangun Negara yang sejahtera. Tentunya implementasi atas program tersebut pun harus diketahui sejauh mana efektivitasnya sehingga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan, apakah pantas atau tidak dilanjutkan sebagai solusi menjaga stabilitas ekonomi ditengah situasi Pandemi, yang juga berkesinambungan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan social. Berangkat dari latar belakang pemahaman konsep dan adanya fenomena tahun politik, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **“Efektivitas Program Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Atas Dampak Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan Regulasi penerapan Program Restrukturisasi di Perbankan?
2. Bagaimana Efektivitas Program Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Atas Dampak Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung?

⁹ Mahfudz, *Loc.Cit.*,

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan Regulasi penerapan Program Restrukturisasi di Perbankan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Efektivitas Program Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Atas Dampak Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Program Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai Efektivitas pelaksanaan Program Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Indonesia khususnya pada lembaga Perbankan syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan rekomendasi bagi Pemerintah dan Perbankan dalam membentuk regulasi program restrukturisasi yang lebih efektif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Ilmu Administrasi Negara

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal yaitu tingkat atas, tingkat menengah dan tingkat bawah.

- Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai.
- Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, seperti memberikan bahan_bahan, sarana-sarana, instruksi-instruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil).
- Di tingkat bawah adalah fungsi pengawas. Dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber_sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ketiga tingkatan ini saling berkaitan, memiliki derajat saling hubungan secara positif dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, seperti beragamnya organisasi dari berbagai jenis dan ukuran. Misalnya dalam suatu pabrik atau dalam suatu bagian pelayanan sosial medik, fungsi-fungsi pengarahan, manajemen dan

pengawasan dapat tertanam hanya pada satu orang. Walaupun demikian, yang terpenting adalah administrasi didefinisikan sebagai proses umum yang pengarahan, manajemen, dan pengawasan merupakan unsur-unsurnya.¹⁰

Juharni dalam Bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Administrasi menjelaskan bahwa Administrasi Negara adalah suatu “*species*” dalam lingkup genus administrasi yang bermakna sebagai kegiatan manusia yang bersifat kooperatif. Jikalau kita menelaah lebih dalam mengenai definisi administrasi Negara, maka dapat kita lihat dari dua pola pemikiran yang berbeda. Pertama, memandang bahwa Administrasi Negara sebagai satu kegiatan yang dilakukan pemerintah, yaitu Lembaga Eksekutif. Kedua, Administrasi Negara lebih luas dari sekedar pembahasan mengenai aktivitas- aktivitas lembaga eksekutif saja. Akan tetapi meliputi seluruh aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang kesemuanya bertolak pada fungsi untuk memberikan pelayanan Publik.¹¹

Selain itu, dikemukakan oleh Rahman bahwa Ilmu administrasi adalah Ilmu tentang fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi Ilmu Administrasi berkaitan dengan Ilmu Organisasi, yang berarti administrasi itu terdapat didalam suatu organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ilmu administrasi adalah suatu system pengetahuan dimana manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat yang dapat memengaruhi hasil pada suatu keadaan dimana setiap orang bekerjasama secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama.¹²

Sementara itu Sahya Anggara dalam bukunya mengungkapkan, Ilmu administrasi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang paling muda, lahir pada akhir abad ke-19. Dalam hal ini, mengutip pengertian administrasi yang dikemukakan oleh Henri Fayol dimana pengertian “administrasi” (Per.: administration) yang umum berlaku di daratan Eropa (Eropa kontinental), di kalangan bangsa Italia, Spanyol,

¹⁰ Sahya Anggara, Op.Cit, H.11.

¹¹Juharni. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Makassar: Cv Sah Media.H.2.

¹² Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makasar: Cv Sah Media. H.2-3.

Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, dan sebagainya. Adapun di Inggris dan negara-negara bekas jajahan Inggris, termasuk Amerika Serikat, pengertian semacam itu tidak ada. Yang mirip-mirip adalah “manajemen”. Henri Fayol (1841–1925), adalah seorang sarjana Prancis, yang pertama melihat adanya prinsip-prinsip universal yang berlaku bagi administrasi yang mana pun dan di mana pun. Oleh karena itu, buku Henri Fayol “*Administration industrielle et generale*” diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “*Industrial and general management*”, suatu terjemahan yang jelas bagi orang Inggris, tetapi membingungkan bagi kita di Indonesia yang menganut pandangan Eropa kontinental sebagai bekas jajahan Belanda.¹³

Kebingungan akan istilah negara di bidang administrasi memang bisa dimengerti. Sebenarnya, ada seorang sarjana yang menyangkal adanya “administrasi negara”, karena organisasi manajerial semakin banyak terkait dengan masalah-masalah negara, pemerintahan, dan politik sehubungan dengan semakin meningkatnya segi keterkaitan dalam masyarakat teknologi. Berawal dari kenyataan itu, saat ini para ahli administrasi negara mulai menerima bahwa kata negara dalam administrasi negara tidak bisa diartikan dalam makna institusi seperti masa sebelumnya. Kata tersebut kini diartikan sebagai makna filosofis, normatif, dan etika. Kata negara kini diartikan sebagai segala sesuatu yang memengaruhi kepentingan umum.¹⁴

Dijelaskan pula oleh Azhar dalam bukunya bahwa administrasi berkaitan erat dengan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi secara menyeluruh. Administrasi akan memberi warna bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.¹⁵

Persoalan Administrasi Negara sebagian besar bersumber dari persoalan-persoalan masyarakat. Tentunya hal ini meliputi segala sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai jawaban masyarakat terhadap masalah-masalah yang memerlukan

¹³Sahya Anggara, Op.Cit, H.14-15.

¹⁴*Ibid.*, H.381.

¹⁵Azhar, M. (2015). Relevansi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. *Notarius*, 274-287.

pemecahan masalah secara kolektif dan bukan perorangan dengan melalui suatu bentuk intervensi pemerintah diluar intervensi-intervensi social dan pihak swasta.¹⁶

Menurut Sahya Anggara dalam Buku Perbandingan Administrasi Negara, Pendekatan klasik tentang administrasi negara mengalami pergeseran tema pokok dalam perkembangannya, yaitu sebagai berikut¹⁷.

1. Administrasi negara mengkaji teori birokrasi, yang semenjak itu berkembang menjadi teori administrasi negara. Perkembangan teori birokrasi terbatas pada konsep organisasi yang berkaitan dengan teori organisasi dan teori politik.
2. Teori administrasi negara dalam tema keduanya berkaitan dengan efisiensi dan *economics of scale* (skala perekonomian). Hal ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat harus memerhatikan biaya yang harus dikeluarkan. Dengan kata lain, pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan biaya yang serendah mungkin. Semua usaha reformasi ditujukan untuk menekan biaya serendah mungkin, selain tujuan-tujuan lain berupa tingkat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, perlakuan adil, merata, serta perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan oleh pemerintah.
3. Teori administrasi negara mengutamakan struktur organisasi formal dalam melakukan reformasi administrasi negara. Hal ini menggambarkan kelemahan administrasi negara dapat disempurnakan melalui reorganisasi atas dasar logical rules (hukum-hukum logika) atau asas-asas dasar, antara lain sebagai berikut.
 - a. Penataan kembali departemen pada kelompok yang sama sesuai dengan tujuannya;
 - b. Mengelompokkan kegiatan-kegiatan serupa dalam satu unit;
 - c. Menyinkronkan tanggung jawab dengan wewenang;

¹⁶ Juharni, *Op.Cit.*, H.17.

¹⁷ Anggara, S. (2012). *Perbandingan Adminsiasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.H.50.

- d. Membekukan satu komando, artinya hanya ada satu pimpinan untuk setiap kelompok.
4. Teori administrasi negara menyangkut masalah anggaran keuangan sebagai alat untuk merencanakan, mengambil keputusan dalam bentuk menentukan prioritas, dan mengalokasikan sumber-sumber ekonomi.

Berbicara tentang perkembangan teori administrasi Negara, K Bailey (dalam Nicolas Henry, 1988:31-32) mengemukakan bahwa administrasi Negara adalah (atau seharusnya) menyangkut perkembangan empat macam teori, sebagai berikut¹⁸.

1. **Teori Deskriptif Eksplanatif**, atau diskripsi struktur bertingkat dan berbagai hubungan dengan lingkungannya. Teori ini memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara, baik dalam bentuk konsep, proposisi atau hukum. Contohnya adalah konsep hirarkhi dari organisasi formal. Konsep tersebut menjelaskan ciri umum dari organisasi formal. Konsep tersebut menjelaskan ciri umum dari organisasi formal, yaitu adanya penjenjangan dalam struktur organisasi.

Konsep yang sederhana seperti hirarkhi ini bisa berkembang menjadi rumit, misalnya teori yang menjelaskan secara deskriptif multihirarkhi dalam mekanisme kerja organisasi publik kurang jelas dijelaskan sebagai orang yang berada dipucuk hirarkhi suatu organisasi dan secara eksklusif bekerja dalam struktur internal tersebut, karena disamping organisasi yang dipimpinnya, ia juga harus berhubungan dengan organisasi atau kelompok-kelompok sosial lain/politik lain yang juga memiliki hirarkhi sendiri. Dalam hal ini manajer suatu organisasi lebih cocok dijelaskan sebagai broker yang senantiasa harus bernegosiasi menjembatani kepentingan-kepentingan organisasi dengan kepentingan-kepentingan lain di luar organisasi yang dipimpinnya.

Pada dasarnya teori deskriptif eksplanatif menjawab dua pertanyaan teori

¹⁸Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Adminisrasi Negara. *Jurnal Inovasi, Volume 9 Number 1*, Url: <Http://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/Jin/Article/View/703/647>, 1-24.

deskriptif, yaitu apa dan mengapa atau apa berhubungan dengan apa. Pertanyaan apa, menuntut jawaban deskriptif mengenai satu realitas tertentu yang dijelaskan secara abstrak ke dalam satu konsep tertentu misalnya, hirarkhi organisasi formal, hirarkhi kebutuhan, organisasi formal, konflik peranan, ketidakjelasan peranan, semangat kerja dan lain-lain.

2. **Teori Normatif**, atau nilai-nilai yang menjadi tujuan bidang ini, alternatif keputusan yang seharusnya diambil oleh penyelenggara administrasi negara (praktisi) dan apa yang seharusnya dikaji dan dianjurkan kepada para pelaksana kebijakan. Teori normatif bertujuan menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Yang termasuk dalam teori ini adalah Utopi, misalnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Teori normatif juga dapat dikembangkan dengan merumuskan kriteria-kriteria normatif yang lebih spesifik, seperti efisiensi, efektivitas, responsibilitas, akuntabilitas, ekonomi, semangat kerja pegawai, desentralisasi, partisipasi, inovasi dan sebagainya. Teori normatif memberikan rekomendasi kearah mana suatu realitas harus dikembangkan atau perlu diubah dengan menawarkan kriteria-kriteria normatif tertentu. Permasalahan dalam teori normatif adalah bahwa kriteria-kriteria yang ditawarkan tidaklah selalu saling mendukung, akan tetapi dalam beberapa hal saling bertentangan. Misalnya penekanan pada efisiensi dapat mengorbankan pemerataan penekanan pada sentralisasi juga dapat mengorbankan akuntabilitas dan inovasi (terutama dari bawah).

3. Teori asumptif, pemahaman yang benar terhadap realitas seorang administrator, suatu teori yang tidak mengambil asumsi model setan maupun model malaikat birokrat. Teori asumptif menekankan pada prakondisi atau anggapan adanya suatu realitas sosial dibalik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Teori X dan Y dari McGregor adalah salah satu contoh dari teori Asumtif. Dalam teori tersebut dikemukakan dua jenis asumsi yang berlawanan tentang sifat manusia. Teori X berasumsi bahwa pada dasarnya manusia bersifat malas dan senang menghindari pekerjaan jika

memungkinkan. Sementara teori Y berasumsi sebaliknya, yaitu bahwa manusia memiliki kemauan untuk bekerja dan memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya dalam mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

4. Teori instrumental, atau peningkatan teknik-teknik manajerial dalam rangka efisien dan efektivitas pencapaian tujuan negara. Pertanyaan pokok yang dijawab pada teori ini adalah bagaimana dan kapan. Teori Instrumental merupakan tindak lanjut (maka) dari proposisi jika karena. Misalnya jika sistem administrasi berlangsung secara begini dan begitu karena ini dan itu, jika desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas birokrasi. Jika manusia dan institusinya sudah siap atau dapat disiapkan pada perubahan sistem administrasi ke arah desentralisasi yang lebih besar, maka strategi, teknik dan alat-alat apa yang dikembangkan untuk menunjangnya.

Teori-teori administrasi negara yang dikemukakan di atas oleh para ahli, banyak tertuju pada peran pemerintah dan dukungan rakyat terhadap masalah-masalah yang dihadapi publik. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam administrasi negara sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli di atas dalam menangani masalah-masalah publik sangat jelas. Karenanya apa yang kemudian menjadi bidang studi Administrasi Negara adalah bagaimana orang-orang mengorganisasikan diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah-masalah publik untuk mencapai tujuan bersama mereka. Pada pengertian tersebut di atas peranan masyarakat sangat menentukan dalam mengatasi masalah-masalah publik.

Dengan kedudukan negara yang mempunyai keterbatasan terutama dari segi biaya untuk memenuhi segala kebutuhan publik, maka peranan masyarakat (swasta) sangat menentukan. Dewasa ini peranan swasta semakin banyak terlihat pada bidang-bidang yang tadinya dimonopoli oleh negara seperti transportasi, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Walaupun demikian peranan pemerintah tetap memegang posisi sentral dalam pemenuhan dan penanganan masalah-masalah publik. Negara adalah merupakan lembaga formal yang memiliki mandat (dengan asumsi bahwa

mekanisme demokratis berlangsung) dari rakyat melalui cara-cara tertentu yang dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku untuk memenuhi kepentingan publik. Karena itu Administrasi Negara secara lebih khusus dapat dijelaskan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama lembaga eksekutifnya, didalam memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan.

Serupa dengan K.Bailey, teori administrasi menurut Wiliam L. Morow, dalam Ali Mufiz, (2004) sebagai berikut:

1. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata terjadi dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
2. Teori Perspektif adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksplotasi keahlian berokrasi, penekanan teori ini ada adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
3. Teori Normatif pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi.
4. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi.
5. Teori Istrumental adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis.

Sedangkan menurut Sephen P. Robbins, berdasarkan kecenderungan gerakannya terdapat lima macam teori administrasi yaitu¹⁹:

1. Teori Hubungan Manusia, Elton Mayo dikenal sebagai perintis teori ini. Pengembangan teori Mayo didasarkan pada penemuan selam memimpin proyek Hawtorne yang berada di lingkungan Western Electric Company pada tahun 1927-1932.
2. Teori Pengambilan Keputusan . Para pemikir yang menonjol dalam bidang ini adalah Simon, March, Russel Eckoff, Jay Forrester, Martin Starr dan Kenneth Boulding, dalam proses pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakan statistik, model optimasi, model informasi dan

¹⁹ [Http://Capoeiranakbrantakan.Blogspot.Com/2012/04/Teori-Teori-Administrasi-Negara.Html](http://Capoeiranakbrantakan.Blogspot.Com/2012/04/Teori-Teori-Administrasi-Negara.Html)

simulasi.

3. Teori Perilaku. Teori perilaku sebenarnya bermaksud untuk mengintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya.
4. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu system yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan (input absorbers), pengolah (prosesor), dan penghasil (output generatot). Selanjutnya kerangka pemikiran system akan menunjukkan dua hal: (a) bahwa perubahan dari atau dalam salah satu subsistem akan mengakibatkan perubahan pada subsistem-subsistem lainnya. (b) suatu system akan selalu berhubungan dengan system yang lebih besar.
5. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada pengembangan struktur organisasi yang dirancang agar secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan.²⁰

Selanjutnya, pada intinya misi utama administrasi negara Indonesia adalah membuat masyarakat dan rakyat Indonesia semakin mampu memproduksi, tidak hanya untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan dalam negeri, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sebagai indikator adanya kemajuan kemakmuran dan kesejahteraan berupa peningkatan pendapatan dan taraf hidup, namun juga mampu meningkatkan ekspor.²¹ Tentunya tidak terlepas dari nilai – nilai pancasila. Filsafat Pancasila penting artinya bagi kesatuan dan persatuan bangsa, pemerataan kemakmuran, dan keadilan sosial. Akan tetapi, jika produksi nasional dan ekspor negara (atau dengan perkataan lain jika pertumbuhan ekonomi) tidak berjalan dengan baik serta meningkat dari tahun ke tahun, makin lama semakin sedikit kemakmuran yang bisa dibagi.²² Artinya, jika sampai hal itu terjadi, maka misi utama administrasi negara Indonesia tersebut belum berjalan dengan baik.

2.2 Pembiayaan Bermasalah

Penilaian tingkat kesehatan dari suatu bank dapat dilihat dari rasio pembiayaan aktiva bermasalah ataupun pembiayaan bermasalah (*non-performing*

²⁰*Ibid.*,

²¹ Anggara, S. *Op.Cit.*, H.197

²²*Ibid.*, H. 198

*financings*NPFs), yang di bank konvensional sering disebut *nonperforming loan* (NPL). Rasio pembiayaan bermasalah ini menjadi salah satu parameter penilaian terkait pengelolaan penyaluran pembiayaan dalam perbankan syariah.

Pembiayaan bermasalah (*non-performing financings*-NPFs) merupakan rasio pembayaran bermasalah terhadap total pembayaran, yang berarti pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah (NPFs) adalah “Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar (*current*) disebut golongan I (satu), Dalam Perhatian Khusus (*under special mention*) disebut golongan II (dua), Kurang Lancar (*substandard*) disebut golongan III (tiga), Diragukan (*doubtful*) disebut golongan IV (empat), dan Macet (*loss*) disebut golongan V (lima).

Kriteria komponen penetapan penggolongan kualitas pembiayaan pada bank syariah diatur secara berbeda berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan. Sesuai Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggolongan Kualitas Mudharabah dan Musyarakah;
2. Penggolongan Kualitas Murabahah, Istishna, Qardh, dan Transaksi Multijasa;
3. Penggolongan Kualitas Ijarah atau Ijarah Muntahiyahbi Tamlik;
4. Penggolongan Kualitas Salam.

Komponen penilaian aspek kualitas pembiayaan sesuai dengan produk pembiayaan, diuraikan sebagai berikut.

- a. Aspek prospek usaha sebagai berikut.
 - 1) Potensi pertumbuhan usaha;
 - 2) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
 - 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - 4) Dukungan dari group atau afiliasi; serta

- 5) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).
- b. Aspek kinerja nasabah sebagai berikut.
 - 1) Perolehan laba;
 - 2) Struktur permodalan;
 - 3) Arus kas; dan
 - 4) Sensitivitas terhadap risiko pasar.
 - c. Aspek kemampuan membayar sebagai berikut.
 - 1) Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee;
 - 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
 - 3) Kelengkapan dokumentasi Pembiayaan; kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
 - 4) Kesesuaian penggunaan dana;
 - 5) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Kualitas golongan pembiayaan ditetapkan kriteria- kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai contoh pada produk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran debitur maka pembiayaan digolongkan berdasarkan sebagai berikut.

- a. Lancar

Apabila angsuran dibayarkan tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, laporan keuangan selalu disampaikan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin oleh debitur sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, laporan keuangan selalu disampaikan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin oleh debitur yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang yang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terdapat pelanggaran persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan keseulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin oleh debitur yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Debitur tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang yang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin oleh debitur yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Pembiayaan bermasalah pada umumnya dapat terjadi karena faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor Intern merupakan faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Seperti, lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan, pengawasan biaya dan pengeluaran yang lemah, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor Ekstern terjadi di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

2.3 Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut sesuai dengan

misi dan fungsi suatu bank. Dari sisi aktiva neraca bank umum terlihat bahwa sebagian besar dana operasional bank diputar dalam pembiayaan. Hal ini terlihat bahwa sumber pendapatan terbesar namun sekaligus merupakan sumber risiko terbesar bagi perbankan adalah pembiayaan. Pembiayaan yang bermasalah atau bahkan macet akan mengganggu operasional dan likuiditas bank.

Bank dapat melakukan analisa pembiayaan untuk menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur untuk mengembalikan pinjaman dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Analisa pembiayaan ini dapat memperkecil risiko pembiayaan bermasalah/macet bagi bank. Hasil dari penilaian tersebut, pihak bank dapat memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan debitur ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan.

Penilaian setiap permohonan pembiayaan sangat bergantung pada faktor jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan pembiayaan dan jumlah pembiayaan. Prinsip dasar dalam menganalisis pembiayaan terkenal dengan sebutan “prinsip 6C” dan “7P”. Prinsip 6C antara lain:

- 1) *Character*, penilaian karakter digunakan untuk mengetahui calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan integritas serta komitmen untuk melunasi pembiayaannya.
- 2) *Capacity*, untuk mengetahui kemampuan calon debitur untuk membayar kewajibannya yang tercermin dalam kondisi keuangan seperti riwayat pembayaran dan pendapatan.
- 3) *Capital*, merupakan modal atau kondisi kekayaan yang dimiliki calon debitur.
- 4) *Collateral*, adalah bentuk jaminan yang diberikan kepada bank, baik fisik maupun non fisik.
- 5) *Condition*, menyangkut kondisi perekonomian secara regional maupun global yang dapat dilihat melalui usaha calon debitur.
- 6) *Constraint*, merupakan faktor hambatan atau rintangan sosial yang ada pada suatu masyarakat tertentu, sehingga usaha calon debitur sulit untuk dijalankan dan dijamin keberhasilannya.

Pada dasarnya analisis “7P” secara substansial sama dengan “prinsip 6C” yaitu sama-sama bertujuan untuk memastikan keputusan pemberian kredit/pembiayaan kepada calon debitur. 7P ini meliputi *personality* (segi kepribadian dan tingkah laku), *party* (menggolongkan calon debitur sesuai modal, loyalitas, serta karakter), *purpose* (tujuan mengajukan kredit/pembiayaan), *prospect* (untuk menilai usaha calon debitur apakah menguntungkan atau mengalami kerugian), *payment* (mengukur sumber dana untuk pengembalian kredit/pembiayaan), *profitability* (kemampuan calon debitur untuk mencari laba), dan *protection* (jaminan).

Tujuan utama analisis tersebut adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah mampu dan mempunyai kemauan untuk memenuhi kewajibannya, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Pemberian pembiayaan terdapat risiko tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan nasabah harus diikuti secara terus-menerus oleh pihak bank.

2.4 Konsep Efektivitas

2.4.1 Ukuran Efektivitas

Pencapaian tujuan atas seperangkat kegiatan yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan Efektivitas. Sebab Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini tentunya terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Yuningsih dan Kharisma (2017) mengungkapkan, bahwa Efektifitas berasal dari kata “efek” yang berarti hubungan sebab akibat. Efektifitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lainnya. Efektifitas berarti bahwa, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain tujuan tercapai karena adanya proses. Sementara itu menurut Rosalina (2012) kata efektif berasal dari kata *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program

disebut efektif apabila tujuan maupun sasaran tersebut tercapai seperti yang telah ditentukan

Oleh karena itu, terdapat ukuran efektivitas, yang menurut Duncan (dalam Hermawan, 2017) sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan. Pencapaian adalah keseluruhan upaya dalam pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh sebab itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Kurun waktupencapaiannya ditentukan,
 - 2) Sasaran merupakan target yang kongkrit.
2. Integrasi. Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi tersebut menyangkut, hal sebagai berikut.
 - 1) Prosedur,
 - 2) Proses sosialisasi.
3. Adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun faktor-faktor adaptasi terdiri dari
 - 1) Peningkatan kemampuan
 - 2) Sarana dan prasarana yang ada/digunakan.

Sementara itu, Cambel J.P mengungkapkan, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut²³:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output

²³ Shabrina, Kemala Ur. Efektivitas Pengamanan Aset Dalam Mewujudkan Pemerintahan Akuntabilitas Di Surabaya. Jurnal, Volume 2 Numb 1

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sedangkan Makmur (2011:7-9) menyatakan bahwa indikator efektivitas adalah sebagai berikut.

1. Ketepatan waktu. Ketetapan waktu dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, akan tetapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Oleh sebab itu penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. Ketepatan perhitungan biaya. Ketetapan perhitungan biaya berkaitan dengan pemanfaatan biaya, agar tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik;
3. Ketepatan dalam pengukuran. Ketetapan ini berkaitan dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya yang menggambarkan daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi;
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Menentukan pilihan bukan merupakan persoalan yang gampang dan juga bukan merupakan tebak-an. Hal tersebut harus melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik, atau yang terjujur di antara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur dalam menentukan pilihan;
5. Ketepatan berpikir. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang terbaik;
6. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan pada suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang dalam memimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti atau sulit dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi;
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya. Sasaran atau tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan itu sendiri;

8. Ketepatan ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik oleh secara individu maupun oleh organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas suatu organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka hal tersebut akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri

Selain itu, Emitai Etzioni (Indrawijaya, 2010:187) mengemukakan pengukuran efektivitas organisasi mencakup 4 kriteria, yaitu sebagai berikut.

1. Adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara internal untuk menghadapi perubahan eksternal.
2. Integrasi. Integrasi merupakan tingkat kemampuan organisasi mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan organisasi lainnya.
3. Motivasi. Motivasi merupakan keterkaitan hubungan antara perilaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Produksi. Produksi merupakan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas berkaitan erat dengan sejauh mana hasil yang dicapai atas hasil yang diinginkan. Oleh karenanya Ukuran Efektivitas sangat penting digunakan dalam rangka menentukan hasil tersebut.

2.4.2 Faktor – Faktor Pengaruh Efektivitas

Efektifitas tentunya tidak semerta-merta dapat memiliki hasil maksimal. Keberhasilan Efektivitas tentunya dipengaruhi oleh berbagai factor. Menurut Steers (dalam Yuningsih dan Kharisma, 2017) ada 4 faktor (variabel pokok) yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yaitu sebagai berikut.

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya, merupakan cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi faktor-faktor seperti desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, dan cakupan perumusan interaksi antar pribadi. Secara singkat struktur diartikan sebagai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanisme yang digunakan dalam produksi, variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran. Teknologi juga dapat berakibat atas tingkat efektivitas selanjutnya, walaupun mungkin tidak langsung.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa variasi teknologi berinteraksi dengan struktur dalam pengaruhnya terhadap keberhasilan organisasi. Artinya, efektivitas jelas sangat diperlancar bila susunan struktur sumber daya organisasi sedemikian rupa, sehingga paling cocok untuk menangani teknologi yang dipakai. Jika hubungan struktur dan teknologi sudah harmonis, yaitu keduanya dapat bekerja sama maka para pekerja akan sedikit saja menemui masalah dalam usaha mencapai tujuan. Ciri organisasi yang berupa struktur organisasi meliputi faktor luasnya desentralisasi. Faktor ini akan mengatur atau menentukan sampai sejauh mana para anggota organisasi dapat mengambil keputusan. Faktor lainnya yaitu spesialisasi pekerjaan yang membuka peluang bagi para pekerja untuk mengembangkan diri dalam bidang keahliannya sehingga tidak mengekang daya inovasi mereka.

2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan ini mencakup dua aspek yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi. Yang meliputi macam-macam atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi dan efektivitas khususnya atribut diukur pada tingkat individu (misalnya pekerjasentries, orientasi pada prestasi, dll). Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi yang mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi seperti kondisi ekonomi, pasar dan peraturan pemerintah. Hal ini mempengaruhi: derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat kestabilan lingkungan.

3. Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja berhubungan dengan peranan perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektivitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerja ini yang sedang menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu.

Pada kenyataannya, anggota-anggota organisasi merupakan faktor yang paling penting terhadap efektivitas karena tingkah laku merekalah yang akan memperlancar atau menghambat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang. Kesadaran akan perbedaan karakter yang terdapat di antara para pekerja sangat penting artinya, karena pekerja yang berbeda memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda pula atas usaha-usaha manajemen untuk mencapai tujuan. Dengan mengetahui perbedaan ini, para manajer atau pemimpin dapat menyesuaikan rancangan mereka terhadap pengorganisasian dan kepemimpinan atas pekerja dalam

pekerjaan, dan dengan demikian meningkatkan kesempatan bekerja sama dan memperbesar dukungan bersama untuk mencapai tujuan organisasi.

Disamping itu, organisasi yang efektif menuntut agar para pekerja mengusahakan bentuk tingkah laku yang spontan dan inovatif, job description tidak akan dapat secara mendetail merumuskan apa yang mereka kerjakan setiap saat, karena bila terjadi keadaan darurat atau luar biasa individu harus mampu bertindak atas inisiatif sendiri dan atau luar biasa individu harus mampu bertindak atas inisiatif sendiri dan atau mengambil keputusan dan mengadakan tanggapan terhadap yang paling baik bagi organisasinya.

4. Kebijakan Dan Praktek Manajemen

Manajer memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara jelas membawakita ke arah tujuan yang diinginkan. Kebijakan harus dipahami tidak berarti bahwa kebijakan harus ditulis. Pada intinya manajemen adalah tentang memutuskan apa yang harus dilakukan kemudian melaksanakannya melalui orang-orang. Definisi ini menekankan bahwa dalam organisasi merupakan sumber daya terpenting.

Dari faktor kebijakan dan praktek manajemen ini, sedikitnya diidentifikasi menjadi enam variabel yang menyumbang efektivitas yaitu sebagai berikut.

- a) Penyusunan tujuan strategis,
- b) Pencarian dan pemanfaatan sumber daya,
- c) Menciptakan lingkungan prestasi,
- d) Proses komunikasi,
- e) Kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan
- f) Inovasi dan adaptasi.

Selain itu, Faktor-faktor yang dipandang sangat signifikan terhadap peningkatan efektivitas organisasi birokrasi pemerintah (daerah) itu antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Perilaku aparatur yang ramah dan selalu bersedia menerima berbagai urusan dan kepentingan para pengguna jasa publik dan selalu melandasi tindakan_tindakannya atas dasar kepentingan umum, hukum dan tujuan yang lebihjelas, sehingga sikap aparatur, demikian responsif dan fleksibel dalam upaya menerima berbagai tuntutan danperubahan-perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- b. Perangkat kebijakan yang implementatif dimana koordinasi komunikasi antar unit organisasi berjalan dengan baik, sehingga tidakterjadi duplikasi pekerjaan karena memang didukung oleh tujuan dan sasaran kebijakan yang pada gilirannya masyarakat dapat memberikan dukungan dan patuh terhadap setiap keputusan badan-badan publik.
- c. Budaya organisasi yang kondusif, yang dicerminkan oleh adanya wewenang, fungsi dan tugas yang cukup jelas serta pelaksanaan pelayanan yang tidak birokratis dan prosedural.
- d. Kualitas pelayanan publik yangsemakin meningkat karena pelaksanaan pelayanan dilakukan secara transparan dan dapat menjamin kepastian dankejelasan hukum, serta pelayanan yang dilaksanakan melalui tata cara yang baik.

Sementara Gulick dan Urwick (dalam Hermawan, 2017) menyatakan faktor atau azas organisasi yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi terdiri dari sebagai berikut.

- a. Penempatan Orang Pada Struktur. Penempatan orang pada struktur harus benar_benar selektif, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karena hal tersebut akanberpengaruh pada organisasi;
- b. Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, karena kepemimpinan berkait dengan proses mempengaruhi dan menggerakkan semua anggota organisasi agar dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi;

- c. Kesatuan Perintah. Adanya kesatuan perintah guna terdapat kepastian jelasannya tanggung jawab agar tidak terjadi kebingungan jika tidak terdapat kesatuan perintah;
- d. Staf Khusus Dan Umum. Diperlukan dalam mendukung kerja organisasi.
- e. Unit Kerjasama. Diperlukan dalam memastikan unit kerja dalam suatu organisasi.
- f. Pelimpahan dan pemakaian asas pengecualian dalam organisasi;
- g. Keseimbangan tanggung jawab dan wewenang;
- h. Rentangan control.

2.5 Prinsip Dasar Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Restrukturisasi secara bahasa berarti penataan kembali (supaya struktur/tatanannya baik).²⁴ Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka restrukturisasi pembiayaan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.²⁵ Restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).²⁶

Restrukturisasi utang bukan hanya simbol kesulitan keuangan perusahaan, tetapi juga salah satu cara utama untuk meringankan kesulitan keuangan, sehingga perusahaan bermasalah dengan harapan pemulihan dapat secara efektif dihindari dari memasuki proses likuidasi kepailitan. Restrukturisasi utang juga membantu untuk membentuk kembali dan meningkatkan hubungan kredit bank-perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk berkembang lebih sehat dan berkelanjutan

²⁴Ri, P. B. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia.H.1170.

²⁵Laksana, Y. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: Pt Elex Media Computindo.H.256.

²⁶Z, A. W. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*,. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. H.447.

di bawah kondisi normal baru. Akibatnya, restrukturisasi utang telah menerima perhatian yang luas baik di dunia akademis maupun dalam praktik. Dalam yang relevan literatur, para sarjana telah meneliti restrukturisasi utang dari banyak aspek, seperti sistem restrukturisasi, struktur modal, tata kelola mekanisme, kinerja perusahaan, hubungan bank dan pendapatan.²⁷

Restrukturisasi utang adalah tindakan independen perusahaan di negara maju negara ekonomi pasar. Karena perbedaan maturitas pasar dan peraturan terkait, pemerintah telah memainkan peran penting peran dalam membimbing dan mendukung praktik restrukturisasi utang perusahaan di Cina. Misalnya, pada awal abad ke-21, Cina mulai menerapkan kebijakan *debt-to-equity*, yang terutama ditujukan untuk mengurangi tingginya debt ratio BUMN dan non-performing assets bank pada saat itu.²⁸

Pada periode saat ini rasio utang yang tinggi dan insiden utang yang tinggi restrukturisasi di China, restrukturisasi utang, sebagai salah satu cara deleveraging, dapat meringankan dilema keuangan dan mengurangi beban utang dari perusahaan yang tertekan, dan hutang perusahaan terkait dengan tingkat investasi dan efisiensi.²⁹ Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain:³⁰

- a. Bank dapat memberikan tambahan kredit Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Bank akan menghitung kembali berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.
- b. Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur Bank meminta kepada nasabah untuk menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat

²⁷ Jianlu Jiang, Et.All., *Op. Cit.*,

²⁸ Jianlu Jiang, Et.All., *Op. Cit.*,

²⁹ Jianlu Jiang, Et.All., *Op. Cit.*,

³⁰ Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Pranadamedia Group.H.130.

menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur.

- c. Kombinasi antara bank dan nasabah Bank akan kembali menghitung total dana yang dibutuhkan oleh debitur, kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencari pemodal baru atau dari pemilik modal lama. Kombinasi ini merupakan cara yang terbaik, karena bank menilai bahwa debitur serius untuk menyelesaikan kreditnya dengan ikut serta menambah modal.

2.6 Dasar Hukum Restrukturisasi Program dan Kegiatan

2.6.1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 yang disempurnakan dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mendefinisikan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui³¹:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.³² Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

³¹Khairunnisa, M. (2016, April). Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Penurunan Npf (Non Performing Financing) Pada Pt. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. *Uin Suska Riau Repository*, Url: *Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Penurunan Npf (Non Performing Financing) Pada Pt. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru*, 1-131.

³²Ikapi. (2009). *Undang-Undang Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.H.296

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank,
 - b. Konversi akad pembiayaan,
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan/atau
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

2.6.2 Peraturan OJK Nomor 17/PJOK.03/2021 Tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 11/Pjok.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019

Penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut hingga saat ini, memberikan atensi yang serius bagi pemerintah, tidak terkecuali mengenai pembiayaan bermasalah di perbankan. Oleh karenanya, Otoritas Jasa Keuangan melakukan perubahan terhadap regulasi tersebut. Peraturan OJK Nomor 17/PJOK.03/2021 Tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 11/Pjok.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019 ini ditetapkan pada 10 September 2021.

Perpanjangan kebijakan countercyclical sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dalam rangka menjaga momentum indikator perbankan yang sudah mengalami perbaikan serta untuk mempersiapkan Bank dan debitur untuk kembali normal secara perlahan sehingga menghindari potensi gejolak setelah kebijakan ini berakhir. Pada ketentuan ini, masa berlaku kebijakan stimulus perekonomian bagi debitur perbankan yang terdampak COVID-19 diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023. Kebijakan

tersebut mencakup penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit/pembiayaan dengan plafon s.d. Rp10 miliar, penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi, serta penetapan kualitas kredit/pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas existing. POJK ini tetap menekankan agar perbankan tetap menerapkan prinsip manajemen risiko dalam rangka implementasi perpanjangan kebijakan stimulus perekonomian tersebut.

POJK ini tetap menekankan penerapan manajemen risiko, termasuk antara lain melalui penyusunan pedoman dan kebijakan, dokumentasi dan administrasi seluruh kebijakan yang diterapkan, dan pelaksanaan simulasi uji dampak penerapan kebijakan terhadap permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS, termasuk untuk memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS. Perpanjangan kedua ketentuan terkait kebijakan stimulus ekonomi diharapkan dapat menjaga stabilitas kinerja baik dari sisi perbankan maupun pelaku usaha sektor riil yang memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional.³³

2.6.3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR kategori pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut³⁴.

1. Kurang lancar, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh hari) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank. Dikatakan kurang lancar memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut.
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari;

³³ <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Ojk-Perpanjang-Kebijakan-Stimulus-Perekonomian>

³⁴ Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. H.67

- b. Sering terjadi cerukan;
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah.
2. Diragukan, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya. Dikatakan diragukan memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut.
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah lebih melampaui 180 hari;
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga;
 - e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.
3. Macet, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau lebih, bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut. Dikatakan macet memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut.
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
 - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.6.4 Petunjuk Teknis Operasional Skema Restrukturisasi Nasabah Pembiayaan Segmen Retail Terdampak Covid-19 PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Petunjuk Teknis Operasional ini merupakan revisi ke 1 (satu) yang berlaku sejak tanggal 9 Juli 2021. Ini merupakan regulasi turunan yang dikeluarkan langsung oleh Bank Syariah Indonesia. Hal yang termaktub pada Petunjuk Teknis Operasional ini bermaksud memberikan pedoman standar untuk keseragaman proses restrukturisasi bagi seluruh Unit Kerja dan jaringan Bank yang terlibat dalam proses restrukturisasi nasabah terdampak Covid 19 yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Isi dari Petunjuk Teknis Operasional ini diantaranya memberikan standar skema restrukturisasi untuk percepatan proses penanganan nasabah terdampak Covid 19 dan membangun persepsi yang sama mengenai penetapan kondisi nasabah dan skema restrukturisasi berdasarkan kondisi nasabah.³⁵

2.7 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari penelitian ini. Selain itu, sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun duplikasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai peneliti terdahulu, peneliti dapatkan beberapa penelitian yang serupa. Tujuan penelusuran tersebut untuk membedakan dengan penelitian terdahulu dan untuk mengisis kekosongan literatur dan pembahasan mengenai objek kajian program Restrukturisasi dalam mengatasi Pembiayaan Bermasakah. Berikut peneliti rangkumkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Muneem, dkk, (2020) yang berjudul “*Issues On Restructuring Of A Financing Facility In Malaysian Islamic Banks*” Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa Restrukturisasi fasilitas pembiayaan syariah di bank Malaysia memberikan bantuan kepada nasabah yang menghadapi kesulitan keuangan. Namun, fasilitas tersebut menimbulkan beberapa kekhawatiran

³⁵Revisi Kesatu Petunjuk Teknis Operasional Skema Restrukturisasi Nasabah Pembiayaan Segmen Retail Terdampak Covid-19 Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk

Syariah seperti restrukturisasi hutang, mengenakan harga jual dan keuntungan baru, dan menggunakan aset lancar untuk kontrak baru. Penelitian bertujuan untuk memeriksa praktik restrukturisasi pembiayaan saat ini dan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan di fasilitas ini di lembaga perbankan Islam Malaysia. Studi ini menemukan bahwa kenaikan kontrak baru atas kontrak yang ada menghasilkan riba. Selain itu, kepemilikan komoditas harus ditransfer dalam kontrak baru untuk menyelesaikan kontrak, namun, kepemilikannya tidak dialihkan dalam praktik restrukturisasi fasilitas pembiayaan.³⁶

2. Jiang, et al., (2019) berjudul “*The impact of debt restructuring on firm investment: Evidence from China*” Berdasarkan penelitian tersebut dampak restrukturisasi utang terhadap investasi perusahaan sangat beragam antara hak milik yang berbeda, sifat industri, restrukturisasi cara dan jumlah pembayaran, dan karakteristik renegotiasi utang. Analisis menunjukkan bahwa restrukturisasi utang memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap mendorong efisiensi investasi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan di industri dengan kapasitas berlebih, dan perusahaan restrukturisasi utang yang melunasi utang dengan aset. Restrukturisasi utang secara signifikan memperburuk overinvestment ketika jumlah restrukturisasi utang besar. Ketika daya tawar pemegang saham lebih tinggi dari *debtholders* dalam renegotiasi utang, restrukturisasi utang memiliki pengaruh penghambatan yang signifikan terhadap underinvestment. Gesekan negosiasi ulang utang yang lebih kecil memperburuk underinvestment dan membantu mengurangi overinvestment.³⁷
3. Tan, (2021) yang berjudul “*The impact of debt restructuring on dynamic investment and financing policies*”. Hasil penelitian menemukan bahwa perusahaan dengan biaya negosiasi ulang yang lebih rendah dan lebih banyak ketidakpastian pada arus kas lebih mungkin untuk menerbitkan utang swasta daripada utang publik. Selain itu dalam penelitian ini ditemukan bahwa

³⁶Abdul Muneem, D. (2020). Issues On Restructuring Of A Financing Facility In Malaysian Islamic Banks. *Jurnal Syariah*, 1-5-126.

³⁷Jinglu Jiang, E. A. (2019). The Impact Of Debt Restructuring On Firm Investment: Evidence From China. *Elsevier*, 325-337.

restrukturisasi utang dapat meringankan *underinvestment* dan melemahkan motif substitusi aset pemegang saham, sehingga mengurangi agensi biaya hutang. Hasil di atas memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan tentang peningkatan investasi dan efisiensi pembiayaan dan menghindari kerugian bobot mati kesejahteraan sosial.³⁸

4. Santoso, dkk, (2019) yang berjudul “*Strategy for Non-Performing Financing Management in Sharia Banks Based on Economic Sector of Financing*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembiayaan bermasalah pengelolaan pembiayaan pada bank syariah berbasis sektor ekonomi pembiayaan. Kajian ini khusus dilakukan pada Bank BRI Syariah di periode 2010 hingga 2017, menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menentukan strategi. Dalam formulasi strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan, terbagi menjadi: menjadi lima level, yaitu level 1) tujuan, level 2) sektor ekonomi, level 3) faktor, tingkat 4) aktor, tingkat 5) program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang perlu mendapat perhatian dengan tingkat kepentingan yang tinggi adalah perdagangan, restoran dan sektor perhotelan, disusul oleh sektor konstruksi dan sektor industri. NS faktor penting yang perlu mendapat perhatian terkait pembiayaan bermasalah adalah penanganan NPF, disusul dengan peringkat bank sebesar bank—profil risiko dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Para aktor yang berperan penting dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah direksi diikuti oleh unit kerja dan kondisi ekonomi. Program pengelolaan pembiayaan bermasalah yang paling penting adalah pengumpulan intensif, kemudian dilakukan restrukturisasi dan penjualan agunan.³⁹
5. Fidhayanti, dkk, (2020) yang berjudul “*Restructuring Policy of Shariah Financing Towards UMKM Affected by Covid-19: Maqashid Syariah Perspective*.” Hasil penelitian menyimpulkan, Restrukturisasi tidak berarti menghilangkan kewajiban debitur, tetapi ada merupakan penyesuaian

³⁸Tan, Y. (2021). The Impact Of Debt Restructuring On Dynamic Investment And Financing. *Elsevier*, 1-14.

³⁹Moch Hadi Santoso, D. (2019). Strategy For Non-Performing Financing . *Journal Of Business And Management Scientific Research Publishing* , 374-385

baru dalam pembayaran cicilan utang. Kebijakan restrukturisasi UMKM bertujuan untuk memberikan kepastian hukum perlindungan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan perbankan di Indonesia di masa pandemi Covid-19.⁴⁰

Berdasarkan penelusuran tersebut, dapat kita lihat bahwa Upaya Restrukturisasi dilakukan pada sebagian besar perbankan diseluruh Negara, seperti China, Malaysia, dan tak terkecuali Indonesia. Penelitian terdahulu sebagian besar berpusat pada program Restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah berdasarkan perspektif syariah, dengan sudut pandang ekonomi. Sedangkan pada penelitian ini, rumusan masalah mengacu pada Restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi, dengan kondisi alamiah yakni di tengah Pandemi Covid-19, ditinjau dalam Konsep Administrasi Negara dan analisa Kesiapan Regulasi Pemerintah ditinjau berdasarkan POJK Nomor Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease -19*.

⁴⁰Dwi Fidayanti, D. (2020). Restructuring Policy Of Shariah Financing Towards Umkm Affected By Covid-19: Maqashid Syariah Perspective. *Atlantis Press*, 121-127.

2.8 Kerangka Pikir

Sahya Anggara dalam buku Ilmu Administrasi Negara mengungkapkan bahwa ada tiga konsep tentang model sistem pemerintahan yang diberlakukan di lembaga negara⁴¹, yakni:

1. Model Kepemerintahan Ekonomi (*Economic Governance Model*), Meliputi Proses Pembuatan Keputusan Yang Memfasilitasi Kegiatan Ekonomi Di Dalam Negeri Dan Interaksi Di Antara Penyelenggara Ekonomi. Economic Governance Mempunyai Implikasi Terhadap Kesenjangan, Kemiskinan, Dan Kualitas Hidup;
2. Model Kepemerintahan Politik (*Political Governance Model*), Mencakup Proses Pembuatan Berbagai Keputusan Untuk Perumusan Kebijakan;
3. Model Kepemerintahan Administratif (*Administrative Governance Model*), Sistem Implementasi Kebijakan.

Dari beberapa teori administrasi yang telah dipaparkan, pada penelitian ini penulis akan menggabungkan beberapa Teori Administrasi yang sesuai dengan konteks permasalahan, dalam hal ini tentang Kebijakan Pemerintah menerapkan program Restrukturisasi pada Pembiayaan bermasalah di dunia perbankan. Tentunya hal ini berkaitan dengan efisiensi dan *economics of scale* (skala perekonomian) dalam teori ilmu Administrasi Negara. Teori yang dimaksud yaitu, teori insrumental, teori asumtif, teori hubungan manusia, teori pengambilan keputusan, dan teori system.

Selanjutnya, pada intinya misi utama administrasi negara Indonesia adalah membuat masyarakat dan rakyat Indonesia semakin mampu memproduksi, tidak hanya untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan dalam negeri, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sebagai indikator adanya kemajuan kemakmuran dan kesejahteraan berupa peningkatan pendapatan dan taraf hidup, namun juga mampu meningkatkan ekspor.⁴² Tentunya tidak terlepas dari nilai – nilai pancasila. Filsafat Pancasila penting artinya bagi kesatuan dan persatuan bangsa, pemerataan kemakmuran, dan

⁴¹ Anggara, S. *Op.Cit.*, H.204

⁴² Anggara, S. *Op.Cit.*, H.197

keadilan sosial. Akan tetapi, jika produksi nasional dan ekspor negara (atau dengan perkataan lain jika pertumbuhan ekonomi) tidak berjalan dengan baik serta meningkat dari tahun ke tahun, makin lama semakin sedikit kemakmuran yang bisa dibagi.⁴³ Artinya, jika sampai hal itu terjadi, maka misi utama administrasi negara Indonesia tersebut belum berjalan dengan baik.

Disisi lain, saat ini Indonesia sedang berada pada situasi yang tidak baik – baik saja, bahkan hal ini pun dirasakan di seluruh dunia. Perkembangan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro,kecil,dan menengah(UMKM),sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas system keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya, sebagai administrator Negara, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan merumuskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 , yakni untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan,menjaga stabilitas system keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. Salah satunya melalui program Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah di perbankan. Tentunya secara khusus hal ini menjadi salah satu implementasi Administrasi Negara dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Restrukturisasi berdasarkan beberapa aspek dalam *good governance* terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kompetensi administrasi, Transparansi dan Efisiensi. Pertama Kompetensi Administrasi, yaitu yang meliputi kompetensi lembaga dan kompetensi individu adalah kemampuan dan karekteristik organisasi dan personildalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. Konsep ini akan dilihat dengan indikator sebagai berikut : kesesuaian antara misi organisasi dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, kejelasan tugas pokok dan fungsi antar

⁴³*Ibid.*, H. 198

organisasi, persyaratan rekrutmen pegawai pada suatu organisasi, persyaratan promosi pegawai pada jabatan tertentu diorganisasi. Kemudian selanjutnya Aspek Transparansi, aspek ini diartikan sebagai keterbukaan yang dimiliki oleh organisasi dalam implementasi kebijakan publik, dimana rakyat secara leluasa dapat memperoleh informasi dan mengetahui secara jelas tentang proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Selanjutnya yang ketiga adalah Aspek Efisiensi. efisiensi dimaksudkan bahwa restrukturisasi yang dilaksanakan harus mampu menghasilkan sebuah organisasi birokrasi yang lebih sederhana, ramping namun kaya fungsi sehingga aspek efisiensi khususnya dalam penggunaan dana publik untuk keperluan birokrasi menjadi lebih baik (efisien).⁴⁴

Menyikapi hal ini, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Syariah Indonesia pun melakukan Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah korporasi yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah. Oleh sebab itu, BUMN diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian Indonesia dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan mampu memberikan kontribusi berharga bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian.⁴⁵

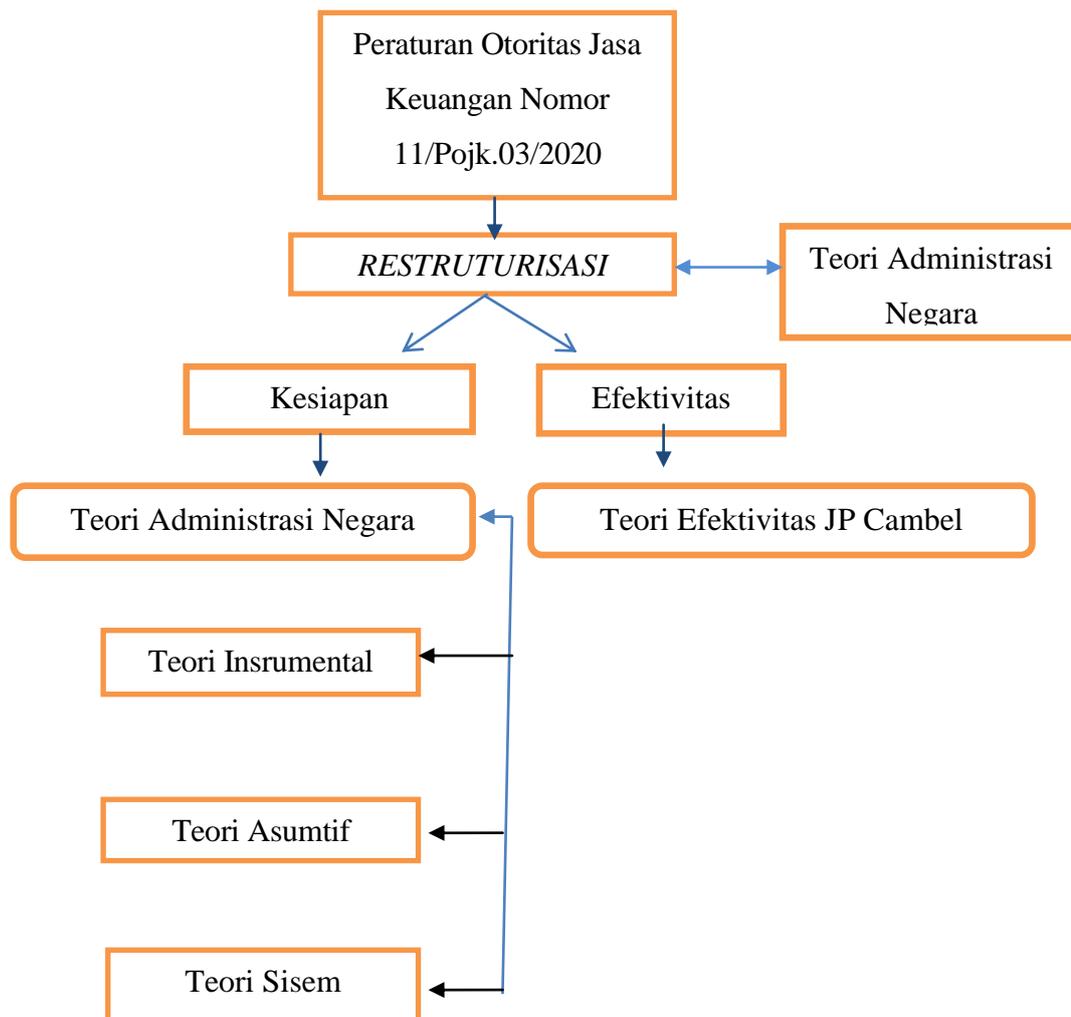
Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil merger daripada tiga bank BUMN yakni Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI syariah Tbk

⁴⁴ Dadang Supriatna, S. M. (2019). Penerapan Aspek Kompetensi Administasi, Transparansi Dan Efisiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Konstituen*, Volume 1 Number 2, Url: <https://www.google.com/search?q=Restrukturisasi+Berdasarkan+Beberapa+Aspek+Dalam+Good+Governance+Terbagi+Menjadi+3+Itiga%29+Aspek+Yaitu+Aspek+>

⁴⁵ Salsabila Sarafina, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan Keuangan Dan Nilai Perusahaan. (2017). *Jurnal Administrasi*, Volume 50 Number 3, Url: <http://Administrasibisnis.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jab/Article/View/2012/2404>, 108-117.

Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.⁴⁶

Lebih jelasnya, peneliti membuat alur atau kerangka berfikir dalam penelitian ini untuk mempermudah penelitian, adapun kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Penelitian

⁴⁶Dadang Supriatna, S. M. (2019). Penerapan Aspek Kompetensi Administasi, Transparansi Dan Efesiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Konstituen*, Volume 1 Number 2, Url: <https://www.google.com/search?q=Restrukturisasi+Berdasarkan+Beberapa+Aspek+Dalam+Good+Governance+Terbagi+Menjadi+3+Itiga%29+Aspek+Yaitu+Aspek+Kompetensi+Adminis+trasi%2c+Transparansi+Dan+Efesiensi.&Safe=Strict&Client=Firefox-B-D&Sxs>, 35-46.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari sistematika rancangannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif⁴⁷. Penelitian kualitatif menghasilkan konsep, teori, atau metode penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mempelajari keadaan objek alam (bukan eksperimen), dimana peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi), dan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi⁴⁸.

Metode penelitian ini berusaha untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya actual pada saat dilakukannya penelitian dengan cara mengklasifikasikan data, menganalisis data, dan kemudian menyimpulkan, sehingga diperoleh jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Bog dan dan Taylor menjelaskan penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.⁴⁹

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena social tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta untuk membuat deskripsi, atau gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki tetapi tidak melakukan pengujian

⁴⁷ Hamidi, Metode penelitian dan Teori Komunikasi, (Malang: UMM Press, 2010), hal.2

⁴⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal.1

⁴⁹ Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2004. H.4.

n hipotesis.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung yang beralamatkan di Jl. Supriadi, No 43 Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ploso Jombang yang beralamatkan di Jombang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah untuk menunjang tercapai tujuan dari penelitian ini. Yang mana pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atas dampak pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung.

3.3 Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.⁵⁰ Secara konkrit, pada penelitian ini dipaparkan pelaksanaan program restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atas dampak pandemi covid-19 **beserta efektivitasnya** ditinjau dalam Teori Administrasi Negara. Secara tersirat melalui penelitian ini dapat menganalisa peran dan fungsi pemerintah sebagai administrator Negara dalam mewujudkan misi Administrasi Negara berdasar pancasila, yakni guna kesejahteraan rakyat dan keadilan social menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

3.4 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁵¹ Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian campuran, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan⁵². Dalam penelitian ini digunakan pendekatan

⁵⁰Azwar, Sarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998. H.7

⁵¹Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, H. 23.

⁵²JhonnyIbrahim, *Op. Cit*; H. 300.

perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan lapangan⁵³.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Restrukturisasi di masa Pandemi COVID-19. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

3.5 Sumber Data

Pada penelitian dengan jenis penelitian campuran ini, maka sumber data yang digunakan lebih dari satu sumber data.

a. Sumber Data Primer

Data primer (field research) adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan tentang tata cara penyidikan, baik dalam proses penangkapan, pemeriksaan, hingga Penahanan. Peneliti akan menulis dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait Restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Oleh karenanya, untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.⁵⁴

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan

⁵³Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*; H. 113

⁵⁴Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011. H.117.

interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁵

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengumpulan data adalah salah satu langkah yang paling strategis yang diambil, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa adanya pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan⁵⁶. Pengumpulan data harus menggunakan teknik yang sesuai. Dalam hal ini pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data tentang efektivitas program restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atas dampak pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung, maka teknik penelitian ini digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Nasution (1998) mengatakan bahwa, observasi merupakan dasar pokok dalam semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan bisa bergerak berdasarkan data, yaitu kebenaran fakta nyata yang didapatkan melalui proses observasi. Melalui observasi, peneliti belajar dan mengetahui tentang perilaku, dan makna dari perilaku itu sendiri⁵⁷. Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung ke lapangan terhadap objek penelitian dan hasilnya dituangkan dalam sebuah tulisan.

Pada penelitian ini metode observasi yang akan digunakan adalah teknik observasi non partisipasi (partisipasi pasif) dan teknik observasi bentuk bebas. Teknik observasi non partisipasi (partisipasi pasif) artinya peneliti datang ke lokasi/lapangan objek penelitian, tetapi peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan dan aktivitas objek penelitian. Dalam hal ini peneliti hanyalah berperan dalam mengamati proses kegiatan tersebut.

⁵⁵ Mamudji, Soerjono Soekanto Dan Sri, *Op.Cit.*, H.24.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D...* hal 223

⁵⁷ *ibid*

Teknik observasi terbuka⁵⁸ adalah kehadiran peneliti yang diketahui oleh subjek penelitian secara terbuka yang memberikan kesempatan kepada peneliti secara sukarela untuk mengamati apa yang terjadi. Subjek penelitian menyadari bahwa peneliti mengamati apa yang peristiwa yang terjadi. Dengan kata lain subjek penelitian mengetahui aktivitas peneliti sejak awal sampai akhir penelitian atau pengamatan observasi.

2. Wawancara

Dalam bukunya Sugiono, Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara atau interview sebagai “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”⁵⁹. Wawancara adalah pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk membuat suatu topik menjadi bermakna.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data tidak hanya ketika seorang peneliti ingin melakukan studi penelitian pendahuluan untuk menemukan suatu masalah yang perlu diteliti, tetapi juga ketika peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang hal-hal mendalam dari responden. Metode pengumpulan data ini adalah tentang diri sendiri atau *self-reported*, atau setidaknya berdasarkan pengetahuan atau keyakinan pribadi.

Susan Stainback (1988), dalam bukunya Sugiono, mengemukakan bahwa: “*interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participan interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation alone*”⁶⁰. Oleh karena itu, wawancara memungkinkan peneliti untuk mempelajari lebih lanjut tentang partisipan yang menginterpretasikan situasi dan fenomena yang tidak

⁵⁸ Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) hal.176

⁵⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta), hal.231

⁶⁰ibid

dapat dilihat dengan teknik observasi.

Jenis wawancara atau *interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data sudah mengetahui secara pasti informasi apa yang akan diambil. Oleh karena itu sebelum melakukan wawancara, pengumpulan data menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam wawancara terstruktur, setiap responden ditanya pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya⁶¹.

Metode wawancara dalam penelitian ini difokuskan untuk bisa mendapatkan data primer mengenai efektivitas program restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atas dampak pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung untuk mengetahui apa yang terjadi dalam aktivitas objek penelitian dan mempermudah memperoleh informasi untuk dapat melengkapi data penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berupa teks tulisan, gambar, atau karya monumental. Dokumentasi tertulis seperti buku harian, kisah hidup, biografi, peraturan, pedoman, dll. Dokumen dalam format gambar seperti foto, gambar langsung, sketsa, dll⁶². Metode dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui data-data tertulis maupun tentang data lain tentang Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung seperti visi misi, keadaan perusahaan, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dalam penelitian.

⁶¹Ibid hal 232

⁶²Ibid hal 234

3.7 Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan data dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.⁶³

Selanjutnya adalah rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis data (*systematizing*) yakni menempatkan bahan berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.8 Alat Bantu Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa alat bantu dalam menunjang penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Pedoman Wawancara

Pedoman ini akan berlaku digunakan sebagai pegangan peneliti dalam melakukan wawancara kepada subjek penelitian maupun informan penelitian supaya tidak meyimpang dari tujuan penelitian.

2. Alat Perekam

Alat perekam yang akan digunakan peneliti adalah handphone untuk menggunakan aplikasi *voice recorder* yang bertujuan untuk merekam proses wawancara dengan subjek penelitian maupun informan penelitian dan menggunakan aplikasi kamera digital untuk mengabadikan proses wawancara. Hal tersebut dilakukan supaya memudahkan peneliti ketika ingin memahami ulang hasil wawancara dan untuk meminimalisir akan terjadinya bias dari peneliti.

⁶³Muhammad, Abdulkadir. *Op.Cit.*,H.126.

3. Alat Tulis

Alat tulis akan digunakan untuk mencatat suatu informasi yang berkaitan dengan jalannya suatu penelitian yang biasanya menggunakan pulpen dan buku catatan kecil.

3.9 Validasi Data

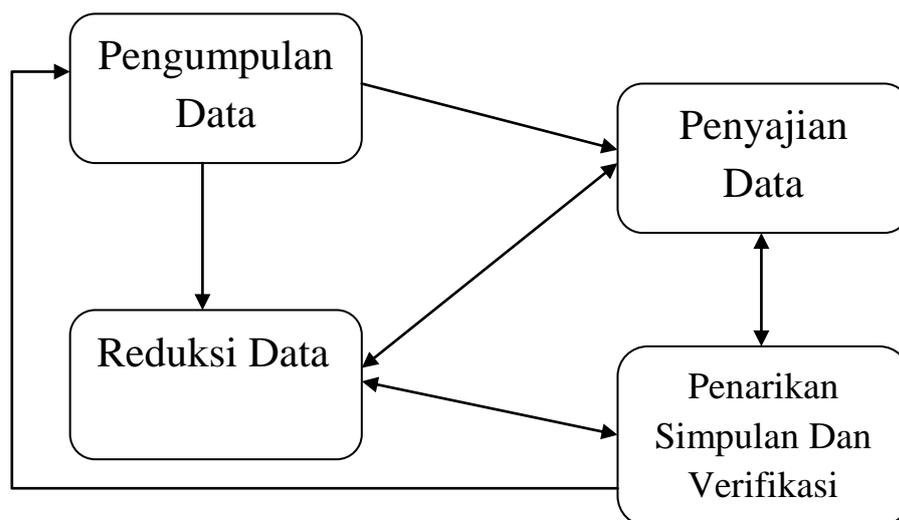
Dalam teknik pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan tiga jalur yaitu sebagai berikut

1. Triangulasi, suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data tersebut (Lexy J. Moleong, 2010: 330). Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan data observasi dengan hasil wawancara, membandingkan situasi dan perspektif orang yang berbeda pendapat dan pandangan, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan.
2. Observasi ketekunan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan masalah atau pertanyaan yang dicari, dan memfokuskannya secara rinci. Pengamatan yang cermat, rinci dan berkelanjutan telah dilakukan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung yang harus dipelajari secara rinci untuk dipahami.
3. Diskusikan dengan teman. Teknik ini dilakukan dengan berdiskusi dengan teman dalam bentuk diskusi analitis, yang memungkinkan Anda dengan cepat mengidentifikasi dan menemukan kekurangan dalam penelitian Anda dan dengan cepat mengkonfirmasi pemahaman mendalam Anda.

3.10 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Teknik analisis data adalah tahap proses lanjutan yang memerlukan pemikiran terus menerus tentang hasil data, pengajuan pertanyaan-

pertanyaan dan menulis catatan singkat selama penelitian (Creswell, 2012). Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam analisis data penelitian ini menggunakan tiga tahapan komponen yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) paparan data (*datadisplay*) dan (3) penarikan simpulan dan verifikasi (*drawing conclusions and verification*). Model komponen analisis data menurut Miles & Huberman terlihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif

Berdasarkan gambar 3.1, tahapan kegiatan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Data yang tersedia di lapangan sangat banyak sehingga harus dikumpulkan secara cermat dan detail. Seperti yang telah disebutkan, semakin lama seorang peneliti bekerja di lapangan, semakin rumit dan kompleks kumpulan datanya. Untuk itu diperlukan analisis data segera dengan reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih poin-poin penting, memfokuskan pada apa yang penting, mencari tema pola penelitiannya, menampilkan data yang direduksi secara lebih jelas, dan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih banyak data sesuai kebutuhan. Reduksi data dapat dibantu oleh perangkat elektronik seperti komputer mini dengan mengkodekan aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, peneliti berpedoman untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada hasil temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti menemukan sesuatu yang asing, tidak diketahui, dan dianggap tidak berpola pada saat melakukan penelitian, maka peneliti harus memperhatikan hal tersebut saat melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan dan wawasan yang luas dan mendalam. Bagi peneliti baru dapat berdiskusi dengan teman dan orang lain yang dianggap ahli dalam melakukan reduksi data. Melalui diskusi, wawasan peneliti dapat dikembangkan dan dapat wawasan serta teori penting dapat dikembangkan untuk mereduksi data.

2. Penyajian Data

Data dapat disajikan dalam bentuk penjelasan singkat atau diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya⁶⁴. Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1984) menemukan bahwa "*the most frequent form or display data for qualitative research data in the has been narrative text*". Teks yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif⁶⁵. Dalam penelitian ini, data terorganisir disajikan dalam bentuk penjelasan sistematis informasi dalam bentuk narasi dan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Simpulan adalah inti pemaknaan penting dari data yang telah dikumpulkan. Penarikan Kesimpulan adalah usaha untuk menemukan atau memahami makna, keteraturan pola penjelasan, kecenderungan sebab akibat, atau rasio. Kesimpulan yang ditarik dapat langsung diverifikasi dengan melihat dan mempertanyakan kembali catatan lapangan untuk pemahaman yang lebih dalam. Selain itu, hal ini dapat dilakukan melalui diskusi. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dan interpretasi data tersebut valid dan kesimpulan yang ditarik adalah suara (Burhan Bungin, 2010: 70). Untuk mendapatkan inferensi data yang valid, Anda harus

⁶⁴ Gunawan, Metode Penelitian ..., hal. 236

⁶⁵ Ibid..., hal 237

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Catatan poin-poin penting yang dikumpulkan dari lapangan. Kemudian dirinci sesuai dengan situasi, pengamatan, dan hasil data di lapangan.
- b. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber. Peneliti memperoleh data detail dari foto, observasi, wawancara, dan dokumen.
- c. Memilih informan yang tepat sesuai dengan pilihan data Anda. Artinya peneliti perlu memperhatikan proses di lapangan agar hasilnya maksimal dan diperhitungkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung Peneliti memberikan kesimpulan yaitu

1. Dalam hal kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan regulasi penerapan program restrukturisasi di perbankan. Pemerintah telah menyiapkan dua alat ukur bagi keabsahan tindak pemerintahan, yaitu: 1) peraturan perundang-undangan sebagai aturan hukum tertulis dan 2) asas umum pemerintahan yang baik sebagai aturan hukum tidak tertulis. Oleh karena itu, dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 17/PJOK.03/2021 Tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 11/Pjok.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019, dapat dianalisa berdasarkan beberapa teori administrasi yaitu sebagai berikut.

- 1) Teori Instrumental, berdasarkan teori ini, manajerial kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diimplementasikan dengan cara mengeluarkan POJK, untuk menjaga momentum perbaikan kinerja debitur yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19), mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, mempersiapkan perbankan dan debitur untuk kembali normal secara perlahan setelah kebijakan stimulus berakhir, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
- 2) Teori Asumtif yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Hal ini diimplementasikan dengan cara melakukan pembaharuan peraturan tersebut secara berkala, serta mengganti beberapa pasal dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pada realitas yang ada.

- 3) Teori Sistem, yaitu segala produk kebijakan yang dikeluarkan memiliki subsistem yang saling berhubungan satu sama lain secara terstruktur. Demikian halnya peraturan OJK tersebut yang memiliki peraturan turunan hingga ke subsistem terendah, yakni Petunjuk Teknis Operasional yang dimiliki oleh masing-masing Bank dan berkaitan satu sama lain dengan regulasi di atasnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, sebagai salah satu alat ukur bagi keabsahan tindak pemerintahan, peraturan perundang - undangan yang ada sudah sesuai pada teori administrasi. Namun, jika melihat Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik masih terdapat asas yang belum diwujudkan secara maksimal, yakni asas Akuntabilitas. Bahwasanya segala kebijakan yang dikeluarkan harus dapat dipertanggung jawabkan. Banyaknya angka pembiayaan bermasalah di perbankan bisa jadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat, dalam hal ini nasabah yang terdampak Covid-19 yang tidak mengetahui dan tidak memahami regulasi tentang Restrukturisasi tersebut. Oleh karenanya perlu Sosialisasi yang lebih maksimal dari pemerintah untuk menyikapi hal ini. Jika kebermanfaatannya atas sebuah regulasi belum bisa dirasakan dan digunakan sepenuhnya oleh masyarakat, hal ini berarti terdapat nilai Akuntabilitas yang juga belum maksimal.

2. Berkaitan dengan efektivitas program restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atas dampak pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung. Berdasarkan dokumen dan panduan yang ada di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17/PJOK.03/2021 Tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 11/Pjok.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019. Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung sudah baik dalam menjalankan selaku pelaku atau pelaksana

pengelolaan keuangan dibuktikan dengan praktek kebijakan yaitu sebagai berikut.

- 1) Nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak membayar angsuran pinjamannya (Collect Dokumen).
- 2) Nasabah yang mengajukan permohonan keringanan angsuran pembiayaan (Proses Commite).

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan teori Efektivitas JP.Cambel dan data yang diberikan oleh internal Bank Syariah Indonesia, secara keseluruhan program Restrukturisasi ini dinilai Efektiv.Utamanya melihat tingkat kepatuhan pembayaran angsuran pembiayaan pasca dilakukan Restrukturisasi pembiayaan menjadi meningkat.Sehinga dapat disimpulkan bahwa program Restrukturisasi efektif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di perbankan.

5.2. Saran

Hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas program restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atas dampak pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung.Namun, penelitian ini tidak sepenuhnya akurat dan masih memiliki beberapa keterbatasan.Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan kesempatan bagi penelitian selanjutnya untuk meningkatkan penelitian.Berdasarkan kesimpulan, ada beberapa hal yang dapat disarankan yaitu sebagai berikut.

1. Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai efektivitas pelaksanaan program restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di Indonesia khususnya pada lembaga Perbankan syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan rekomendasi bagi pemerintah dan perbankan dalam membentuk regulasi program restrukturisasi yang lebih efektif.Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah sebagai solusi atas suatu permasalahan dalam kehidupan bernegara harus ditindaklanjuti secara maksimal. Agar sebuah kebijakan

tersebut tidak hanya terbentuk menjadi sebuah dokumen tertulis, melainkan benar benar dapat dirasakan kebermanfaatannya secara tepat guna. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis memberikan saran, agar Sosialisasi terkait Peraturan OJK Nomor 17/PJOK.03/2021 Tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 11/Pjok.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019 dapat dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. N. (2020, Maret). Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). *Akmen*, Volume 17 Nomor 1, Url: <https://E-Jurnal.Stienobel-Indonesia.Ac.Id/Index.Php/Akmen/Article/View/866/823>.
- Abdul Muneem, D. (2020). Issues On Restructuring Of A Financing Facility In Malaysian Islamic Banks. *Jurnal Syariah*, 1-5-126.
- Abdulkadir Muhammad, Op.Cit; H. 113
- Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Adminisrasi Negara. *Jurnal Inovasi*, Volume 9 Number 1, Url: <http://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/Jin/Article/View/703/647>, 1-24.
- Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2012). Perbandingan Adminsration Negara. Bandung: Pustaka Setia.H.50.
- Anggara,S. Op.Cit., H.197
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, H. 23.
- Azhar, M. (2015). Relevansi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. *Notarius*, 274-287.
- Azwar, Sarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998. H.7
- Dadang Supriatna, S. M. (2019). Penerapan Aspek Kompetensi Administasi, Transparansi Dan Efisiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Konstituen*, Volume 1 Number 2, Url: <https://Www.Google.Com/Search?Q=Restrukturisasi+Berdasarkan+Beberapa+Aspek+Dalam+Good+Governance+Terbagi+Menjadi+3+Itiga%29+Aspek+Yaitu+Aspek+>

- Dadang Supriatna, S. M. (2019). Penerapan Aspek Kompetensi Administasi, Transparansi Dan Efisiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Konstituen*, Volume 1 Number 2, Url: <https://www.google.com/search?q=Restrukturisasi+Berdasarkan+Beberapa+Aspek+Dalam+Good+Governance+Terbagi+Menjadi+3+Itiga%29+Aspek+Yaitu+Aspek+Kompetensi+Administrasi%2c+Transparansi+Dan+Efisiensi.&Safe=Strict&Client=Firefox-B-D&Sxs>, 35-46.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.H.67
- Dokumen Ketentuan Restrukturisasi Nasabah Terdampak Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia.
- Dwi Fidhayanti, D. (2020). *Restructuring Policy Of Shariah Financing Towards Ukm Affected By Covid-19: Maqashid Syariah Perspective*. Atlantis Press, 121-127.
- Gunawan, Metode Penelitian ..., hal. 236
- Hamidi, Metode penelitian dan Teori Komunikasi, (Malang:UMM Press, 2010), hal.2
- [Http://Capoeiranakbrantakan.Blogspot.Com/2012/04/Teori-Teori-Administrasi-Negara.Html](http://Capoeiranakbrantakan.blogspot.com/2012/04/Teori-Teori-Administrasi-Negara.html)
- [Https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Ojk-Perpanjang-Kebijakan-Stimulus-Perekonomian](https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-perpanjang-kebijakan-stimulus-perekonomian)
- Ikapi. (2009). *Undang-Undang Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.H.296
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Pranadamedia Group.H.130.
- Jhonny Ibrahim, Op.Cit; H. 300.
- Jianlu Jiang, Et.All., Op.Cit.,
- Jinglu Jiang, E. A. (2019). *The Impact Of Debt Restructuring On Firm Investment: Evidence From China*. Elsevier, 325-337.
- Juharni. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Makassar: Cv Sah Media.H.2.
- Khairunnisa, M. (2016, April). *Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Penurunan Npf (Non Performing Financing) Pada Pt.*

- Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. Uin Suska Riau Repository, Url: Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Penurunan Npf (Non Performing Financing) Pada Pt. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, 1-131.
- Laksmiana, Y. (2009). Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah. Jakarta: Pt Elex Media Computindo.H.256.
- Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) hal.176
- Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. Point, Vol. 2, No. 1, Url: [Ejournals.Umma.Ac.Id/Index.Php/Point/Article/View/576/408](http://ejournals.umma.ac.id/index.php/point/article/view/576/408).
- Mamudji, Soerjono Soekanto Dan Sri, Op.Cit., H.24.
- Moch Hadi Santoso, D. (2019). Strategy For Non-Performing Financing . Journal Of Business And Management Scientific Research Publishing , 374-385
- Moeleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2004. H.4.
- Muhammad, Abdulkadir. Op.Cit.,H.126.
- Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011. H.117.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Jihi Parahyangan Centre For International Studies, Volume, Url: [Http://103.36.68.33/Index.Php/Jurnalilmiahhubunganinternasiona/Article/View/3870](http://103.36.68.33/index.php/jurnalilmiahhubunganinternasiona/article/view/3870), 1-6.
- Rahman, M. (2017). Ilmu Administrasi. Makasar: Cv Sah Media. H.2-3.
- Revisi Kesatu Petunjuk Teknis Operasional Skema Restrukturisasi Nasabah Pembiayaan Segmen Retail Terdampak Covid-19 Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk
- Ri, P. B. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pt Gramedia.H.1170.
- Sahya Anggara, Op.Cit, H.11.
- Sahya Anggara, Op.Cit, H.14-15.
- Salsabila Sarafina, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan Keuangan Dan Nilai Perusahaan Keuangan

- Dan Nilai Perusahaan. (2017). *Jurnal Administrasi*, Volume 50 Number 3, Url:
[Http://Administrasibisnis.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jab/Article/View/2012/2404](http://Administrasibisnis.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jab/Article/View/2012/2404), 108-117.
- Shabrina, Kemala Ur. Efektivitas Pengamanan Aset Dalam Mewujudkan Pemerintahan Akuntabilitas Di Surabaya. *Jurnal*, Volume 2 Numb 1
- Sitorus, R. (2021). Beroperasi 1 Februari 2021, Ini Logo Dan Susunan Direksi Bank Syariah Indonesia. Jakarta: Financialbisnis.Com Url:
[Https://Finansial.Bisnis.Com/Read/20210127/231/1348808/Beroperasi-1-Februari-2021-Ini-Logo-Dan-Susunan-Direksi-Bank-Syariah-Indonesia](https://Finansial.Bisnis.Com/Read/20210127/231/1348808/Beroperasi-1-Februari-2021-Ini-Logo-Dan-Susunan-Direksi-Bank-Syariah-Indonesia).
- Sitorus, R. (2021). Beroperasi 1 Februari 2021, Ini Logo Dan Susunan Direksi Bank Syariah Indonesia. Jakarta: Financialbisnis.Com Url:
[Https://Finansial.Bisnis.Com/Read/20210127/231/1348808/Beroperasi-1-Februari-2021-Ini-Logo-Dan-Susunan-Direksi-Bank-Syariah-Indonesia](https://Finansial.Bisnis.Com/Read/20210127/231/1348808/Beroperasi-1-Februari-2021-Ini-Logo-Dan-Susunan-Direksi-Bank-Syariah-Indonesia).
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal.1
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta), hal.231
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.... hal 223
- Tan, Y. (2021). *The Impact Of Debt Restructuring On Dynamic Investment And Financing*. Elsevier, 1-14.
- Wawancara dengan Bapak Samsul Amin, (Senin, 14 Maret 2022), di PT. BSI KCP Demak.
- Yusuf, M. F. (2020, April 22). Smartlegal.Id. Retrieved Juni 20, 2020, From Smartlegal.Id: [Https://Smartlegal.Id/Galeri-Hukum/Pandemi-Covid-19/2020/04/22/Mekanisme-Restrukturisasi-Kredit-Bagi-Debitur-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19/](https://Smartlegal.Id/Galeri-Hukum/Pandemi-Covid-19/2020/04/22/Mekanisme-Restrukturisasi-Kredit-Bagi-Debitur-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19/)
- Z, A. W. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*,. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. H.447.